

**PROFIL ASN KABUPATEN BATANG
PERIODE MARET 2024
REGISTER BPS : K-22.3325.001**

JUMLAH ASN BERDASARKAN :

1. PANGKAT DAN GOLONGAN
2. ESELON JABATAN
3. TINGKAT PENDIDIKAN
4. JENIS KELAMIN
5. AGAMA
6. USIA

**BKD KABUPATEN BATANG
BIDANG MUTASI DAN INKA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE MARET 2024 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE MARET 2024 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE MARET 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 29 Maret 2024
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 METODE PENYUSUNAN DATA.....	4
1. PENGUMPULAN DATA.....	4
2. PENYAJIAN DATA	4
BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI.....	5
TABEL 2.1 ASN BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN	6
TABEL 2.2 ASN BERDASARKAN ESELON JABATAN.....	6
TABEL 2.3 ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN	7
TABEL 2.4 ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	7
TABEL 2.5 ASN MENURUT AGAMA	9
TABEL 2.6 ASN BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI	11
TABEL 2.7 ASN FUNGSIONAL PENDIDIKAN	11
TABEL 2.8 ASN MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN	12
TABEL 2.9 ASN FUNGSIONAL LAINNYA	14
TABEL 2.10 ASN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	22
TABEL 2.11 ASN BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup

pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk aneka informasi Statistik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Aparatur Sipil Negara dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil ASN Kabupaten Batang Bulan Maret 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 - f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
 - g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil ASN Pemerintah Kabupaten Batang Bulan Maret 2024 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.

4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang

1.4 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE MARET 2024 disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB II

HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 29 Maret 2024 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan
2. Jumlah ASN berdasarkan Eselon Jabatan
3. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan
4. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah ASN berdasarkan Agama
6. Jumlah ASN berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural
7. Jumlah ASN berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
8. Jumlah ASN berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah ASN Kabupaten Batang keadaan Bulan ***Maret 2024*** ***adalah 6.522*** ASN terinci sebagai berikut :

TABEL 2.1 ASN BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	54	5	59
II/a	Pengatur Muda	62	4	66
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	76	5	81
II/c	Pengatur	214	147	361
II/d	Pengatur Tingkat I	194	55	249
III/a	Penata Muda	705	1420	2125
III/b	Penata Muda Tingkat I	340	471	811
III/c	Penata	234	475	709
III/d	Penata Tingkat I	335	605	940
IV/a	Pembina	323	394	717
IV/b	Pembina Tingkat I	153	184	337
IV/c	Pembina Utama Muda	46	15	61
	Jumlah	2741	3781	6522

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah ASN terbanyak adalah ASN Golongan III (4585 ASN) , diikuti ASN Golongan IV (1115 ASN), ASN Golongan II (757 ASN) dan jumlah ASN terendah adalah ASN Golongan I (65 ASN).

TABEL 2.2 ASN BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Total
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1383	2551	3934
Jabatan Pelaksana	NON	1111	1091	2202
Jabatan Struktural	II.b	24	1	25
Jabatan Struktural	III.a	39	6	45
Jabatan Struktural	III.b	57	34	91
Jabatan Struktural	IV.a	94	69	163
Jabatan Struktural	IV.b	33	29	62
Jumlah		2741	3781	6522

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa jumlah Eselon ASN terbanyak adalah Eselon IV (225 ASN), diikuti ASN Eselon III (136 ASN), ASN Eselon II (25 ASN).

TABEL 2.3 ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S-3	3	0	3
S-2	188	161	349
S-1	1678	2687	4365
Diploma IV	22	77	99
Diploma III	177	690	867
Diploma II	43	22	65
Diploma I	1	4	5
SLTA	486	124	610
SLTP	100	8	108
Sekolah Dasar	43	8	51
Jumlah	2741	3781	6522

Dari Tabel 2.3 jumlah ASN didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 (4365 ASN), diikuti oleh tingkat pendidikan D.III (867 ASN) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan S-3 (3 ASN)

TABEL 2.4 ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	UNOR	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	14	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	10	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	30	38	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	16	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	19	41	60
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	26	40
7	DINAS KESEHATAN	650	163	813
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	13	6	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	18	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	41	52
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	50	78	128
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	19	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16	113	129
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	11	22
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13	12	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2407	1494	3901

18	DINAS PERHUBUNGAN	4	40	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	11	57	68
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17	15	32
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12	21	33
22	DINAS SOSIAL	8	12	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	24	18	42
24	KECAMATAN BANDAR	4	14	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	3	8	11
26	KECAMATAN BATANG	24	46	70
27	KECAMATAN BAWANG	4	8	12
28	KECAMATAN BLADO	5	4	9
29	KECAMATAN GRINGSING	2	8	10
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	8	9
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	6	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	16	17
34	KECAMATAN SUBAH	2	9	11
35	KECAMATAN TERSONO	3	9	12
36	KECAMATAN TULIS	2	10	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	7	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	17	26
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	217	114	331
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	74	29	103
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	49	55
43	SEKRETARIAT DAERAH	33	66	99
44	SEKRETARIAT DPRD	5	22	27
	Jumlah	3781	2741	6522

Dari Tabel 2.4 jumlah ASN dengan jenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak 3.781 ASN sedangkan ASN dengan jenis kelamin laki-laki 2.741 ASN, selisih 1.040 ASN.

TABEL 2.5 ASN MENURUT AGAMA

No	UNOR	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	27	0	1	0	0	0	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	66	1	1	0	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25	0	0	0	0	0	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	60	0	0	0	0	0	60
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	39	0	1	0	0	0	40
7	DINAS KESEHATAN	802	2	8	0	1	0	813
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	19	0	0	0	0	0	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	0	0	0	0	0	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51	0	1	0	0	0	52
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	127	0	1	0	0	0	128
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31	0	0	0	0	0	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129	0	0	0	0	0	129
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	0	0	0	0	0	22
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25	0	0	0	0	0	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3857	13	31	0	0	0	3901
18	DINAS PERHUBUNGAN	42	1	1	0	0	0	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	68	0	0	0	0	0	68
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32	0	0	0	0	0	32
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32	0	1	0	0	0	33
22	DINAS SOSIAL	20	0	0	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	42	0	0	0	0	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	18	0	0	0	0	0	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	11	0	0	0	0	0	11
26	KECAMATAN BATANG	70	0	0	0	0	0	70
27	KECAMATAN BAWANG	12	0	0	0	0	0	12
28	KECAMATAN BLADO	9	0	0	0	0	0	9

29	KECAMATAN GRINGSING	10	0	0	0	0	0	10
30	KECAMATAN KANDEMAN	9	0	0	0	0	0	9
31	KECAMATAN LIMPUNG	10	0	0	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	11	0	0	0	0	0	11
35	KECAMATAN TERSONO	12	0	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	12	0	0	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	11	0	0	0	0	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25	0	1	0	0	0	26
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	326	2	2	0	1	0	331
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	103	0	0	0	0	0	103
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	54	1	0	0	0	0	55
43	SEKRETARIAT DAERAH	99	0	0	0	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	27	0	0	0	0	0	27
	JUMLAH	6448	22	50	0	2	0	6522

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah ASN dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 99% (6448 ASN) dari seluruh ASN sisanya dibagi oleh Kristen (50 ASN), Katholik (22 ASN), Budha (2 ASN), Hindu (0 ASN), dan Konghuchu (0 ASN).

TABEL 2.6 ASN BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia	Terisi	Kosong
2.a	1	0	1
2.b	32	25	7
3.a	56	45	11
3.b	105	91	14
4.a	190	163	27
4.b	76	62	14
TOTAL	460	386	74

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (27 jabatan), hanya terisi 163 dari 190 jabatan yang tersedia.

TABEL 2.7 ASN FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	AHLI PERTAMA - GURU IPA	0	1	1
2	Guru	4	3	7
3	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	1	0	1
4	GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	1	2	3
5	GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA	1	7	8
6	GURU IPA AHLI PERTAMA	0	2	2
7	GURU KELAS AHLI PERTAMA	49	128	177
8	Guru Madya	312	436	748
9	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	1	3	4
10	Guru Muda	283	560	843
11	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	31	48	79
12	GURU PENJAS AHLI PERTAMA	2	1	3
13	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	11	2	13
14	Guru Pertama	199	304	503
15	GURU PPKN AHLI PERTAMA	1	2	3
16	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	0	1	1
17	Pamong Belajar Madya	2	0	2
18	Pamong Belajar Pertama	0	1	1
19	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	1	0	1
20	Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP Madya	0	1	1
21	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KURIKULUM DAN PENILAIAN SMP	1	0	1

22	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KURIKULUM, PENILAIAN, PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK	1	0	1
23	Pengawas Sekolah Madya	31	11	42
24	Pengawas Sekolah Madya - TK/SD	0	1	1
25	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
26	Penilik Madya	4	0	4
27	Penilik Muda	2	1	3
	Jumlah	939	1520	2459

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak diisi oleh jabatan Guru (2395 ASN) dari 2459 ASN fungsional pendidikan, sisanya diisi Pengawas (52 ASN), Penilik (7 ASN) dan Pamong belajar (5 ASN).

TABEL 2.8 ASN MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
2	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	0	1
3	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	3	4
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	1	2
5	Apoteker Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	4	4
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	6	6
7	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non BLUD	1	1	2
8	Asisten Apoteker Penyelia	1	14	15
9	Asisten Apoteker Penyelia Non BLUD	0	1	1
10	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	0	4	4
11	Bidan Ahli Madya / Madya	0	17	17
12	Bidan Ahli Muda / Muda	0	40	40
13	Bidan Ahli Pertama / Pertama	0	22	22
14	Bidan Mahir / Lanjutan	0	96	96
15	Bidan Pelaksana Lanjutan	0	114	114
16	Bidan Penyelia	0	88	88
17	BIDAN TERAMPIL	0	3	3
18	Bidan Terampil / Pelaksana	0	36	36
19	Dokter Ahli Madya / Madya	22	27	49
20	Dokter Ahli Muda / Muda	0	3	3
21	DOKTER AHLI PERTAMA	1	1	2
22	Dokter Ahli Pertama / Pertama	7	7	14
23	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	1	4	5

24	Dokter Gigi Ahli Pertama	0	8	8
25	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	0	1
26	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	1	0	1
27	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	0	1	1
28	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	2	2
29	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	2	0	2
30	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
31	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
32	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	1	0	1
33	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
34	Nutrisionis Ahli Madya / Madya NON BLUD	0	1	1
35	Nutrisionis Ahli Muda / Muda	0	6	6
36	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama	1	0	1
37	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	1	1
38	Nutrisionis Mahir / Lanjutan	0	1	1
39	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
40	Nutrisionis Penyelia	0	9	9
41	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	0	1	1
42	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	0	1	1
43	Penata Anestesi Ahli Madya	1	1	2
44	Penata Anestesi Ahli Muda	2	0	2
45	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	3	4
46	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	0	1
47	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA NON BLUD	1	0	1
48	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2	0	2
49	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA - NON BLUD	0	1	1
50	Perawat Ahli Madya	8	21	29
51	Perawat Ahli Muda	13	18	31
52	Perawat Ahli Pertama	15	6	21
53	Perawat Gigi Ahli Muda	0	1	1
54	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	2	3
55	Perawat Gigi Penyelia	1	16	17
56	Perawat Gigi Terampil	1	5	6
57	Perawat Madya	4	9	13
58	Perawat Mahir	1	5	6
59	Perawat Muda	4	10	14
60	Perawat Pelaksana	2	0	2

61	Perawat Pelaksana Lanjutan	4	15	19
62	Perawat Penyelia	63	143	206
63	Perawat Pertama	1	1	2
64	PERAWAT TERAMPIL	1	4	5
65	Perekam Medis Pelaksana	5	6	11
66	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
67	Perekam Medis Penyelia	1	5	6
68	Perekam Medis Penyelia NON BLUD	1	0	1
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	0	1
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	0	2	2
71	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama / Kesehatan Pertama	0	1	1
72	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
73	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	6	7
74	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia BLUD	0	1	1
75	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	6	8	14
76	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non BLUD	3	1	4
77	Radiografer Pelaksana	0	2	2
78	Radiografer Penyelia	3	3	6
79	Refraksionis Optisien Penyelia	0	1	1
80	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	0	2	2
81	Sanitarian Ahli Madya / Madya	0	2	2
82	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
83	Sanitarian Penyelia	2	4	6
84	TEKNIK ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	0	1
85	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	0	1	1
86	Teknisi Elektromedis Pelaksana	3	0	3
87	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
88	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	2	0	2
89	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	1	1	2
90	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	0	1	1
91	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	0	1
	Jumlah	205	840	1045

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak diisi oleh jabatan Bidan (416 ASN) dari 1045 ASN.

TABEL 2.9 ASN FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN	1	0	1
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DATA, INFORMASI DAN KERJASAM	0	1	1
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	1	0	1
5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA (PB)	0	1	1
6	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA (PB)	0	1	1
7	ANALIS HUKUM AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	0	1	1
8	ANALIS HUKUM MUDA (PB)	0	1	1
9	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	0	1	1
10	ANALIS KEBENCANAAN MUDA (PB)	2	0	2
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (PB)	0	2	2
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	0	1
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR ASPIRASI DAN DOKUMENTASI	1	0	1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	1	0	1
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGANGGARAN	1	0	1
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGAWASAN	1	0	1
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	0	1	1
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	1
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	1	1
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1	0	1
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYUSUN PROGRAM	1	0	1
22	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PB	1	1	2
23	ANALIS KEBIJAKAN MUDA (PB)	5	4	9

24	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	0	1	1
25	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	1
26	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	1	0	1
27	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	0	3	3
28	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2	2	4
29	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA (PB)	2	4	6
30	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
31	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS HOLTIKULTURA	0	1	1
32	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	1	0	1
33	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	0	1	1
34	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	0	1	1
35	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
36	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENELITIAN	0	1	1
37	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGLOLAAN PASAR	1	0	1
38	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	0	1	1
39	ANALIS PERDAGANGAN MUDA (PB)	2	0	2
40	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	1	0	1
41	analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda (pb)	1	0	1
42	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	0	1	1
43	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA (PB)	1	6	7
44	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	2	3
45	ARSIPARIS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1	0	1
46	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	2	2

47	Arsiparis Mahir	0	1	1
48	ARSIPARIS MUDA (PB)	0	1	1
49	Arsiparis Pelaksana	0	2	2
50	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
51	Arsiparis Penyelia	2	0	2
52	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	1
53	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	0	5
54	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	4	6
55	Auditor Madya	2	1	3
56	Auditor Muda	3	7	10
57	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	2	0	2
58	Instruktur Muda	0	1	1
59	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	0	1	1
60	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	0	1
61	Medik Veteriner Muda (PB)	0	1	1
62	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
63	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA (PB)	1	0	1
64	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	0	1	1
65	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
66	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
67	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN OLAHRAGA	0	1	1
68	Pemadam Kebakaran Terampil	4	0	4
69	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA (PB)	1	1	2
70	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI, PENGENDA	0	1	1
71	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUAR	1	0	1
72	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGGERAKAN INSTITUSI DAN PERA	1	0	1
73	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYULUH DAN PENGGERAKAN	0	1	1
74	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA (PB)	0	1	1

75	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEDARURATAN DAN LOGISTIK	0	1	1
76	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA (PB)	1	1	2
77	Penata Perizinan Ahli MUDA	1	2	3
78	PENATA RUANG AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG	1	0	1
79	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	1	2
80	PENATA RUANG MUDA (PB)	0	1	1
81	Penera Ahli Pertama	0	2	2
82	Penera Pelaksana	1	1	2
83	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	0	1	1
84	Pengantar Kerja Pertama	0	2	2
85	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	1	0	1
86	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
87	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
88	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	0	1
89	Pengawas Bibit Ternak Pertama	0	1	1
90	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA (PB)	1	0	1
91	Pengawas K metrologian Pertama	1	0	1
92	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, PERIJINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERAT	1	0	1
93	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	1	0	1
94	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
95	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	1	0	1
96	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN	1	0	1
97	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA (PB)	0	1	1
98	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
99	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
100	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	4	0	4

101	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	1	6	7
102	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	0	1	1
103	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	0	1
104	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	0	1	1
105	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
106	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	1	2	3
107	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	0	3
108	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	6	0	6
109	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1	0	1
110	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA (PB)	0	1	1
111	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0	1	1
112	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH	1	0	1
113	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA (PB)	0	1	1
114	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA/TERAMPIL	0	1	1
115	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	0	1	1
116	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	0	1	1
117	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI	1	0	1
118	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	1	0	1
119	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	0	1
120	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA (PB)	2	2	4
121	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	0	2
122	PENYULUH PERINDUSTRIAN MUDA (PB)	2	0	2

123	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	16	8	24
124	Penyuluh Pertanian Madya	8	1	9
125	Penyuluh Pertanian Muda	7	4	11
126	PENYULUH PERTANIAN MUDA (PB)	0	2	2
127	Penyuluh Pertanian Pelaksana	0	2	2
128	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12
129	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	20	6	26
130	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	1	1
131	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	0	2
132	PENYULUH SOSIAL MUDA (PB)	1	0	1
133	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1	1
134	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1	0	1
135	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	1
136	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	0	1
137	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM	3	0	3
138	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	1	1	2
139	Perencana Muda	0	1	1
140	PERENCANA MUDA (PB)	9	6	15
141	Perencana Pertama	2	2	4
142	PERISALAH LEGISLATIF MUDA (PB)	1	0	1
143	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	0	2
144	Polisi Pamong Praja Terampil	5	1	6
145	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	1
146	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA (PB)	1	1	2
147	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	1	1
148	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	0	2	2
149	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	1	0	1
150	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	0	1

151	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	0	1	1
152	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0	1
153	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1	0	1
154	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
155	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9
156	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BLUD	0	1	1
157	Pranata Komputer Pertama	3	3	6
158	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	1	3	4
159	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL BLUD	1	0	1
160	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR LAYANAN, INFORMASI, OTOMASI DAN KERJASAMA	0	1	1
161	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	0	1	1
162	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
163	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
164	SANDIMAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	1	0	1
165	STATISTISI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR STATISTIK SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN BUDAYA	1	0	1
166	STATISTISI MUDA (PB)	0	1	1
167	Statistisi Pelaksana	0	1	1
168	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
169	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	3	0	3
170	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA (PB)	1	0	1
171	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
172	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	1	0	1
173	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	1	0	1
174	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1
175	Teknik Pengairan Pelaksana	2	0	2
176	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAWAS	1	0	1
177	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
178	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS P	0	1	1
179	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	0	1	1
180	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRAS	1	0	1

181	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	1	0	1
182	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
183	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
184	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
185	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
	JUMLAH	238	191	429

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (86 ASN) dari 429 ASN fungsional Lainnya.

TABEL 2.10 ASN FUNGSIONAL UMUM

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	4	0	4
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	0	1
3	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	2	1	3
5	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	1	1
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	0	1
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	3	4
8	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	2	3
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	0	9	9
10	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
11	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	9	10
12	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	163	546	709
13	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	9	10
14	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	1	1	2
15	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	0	1	1
16	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	0	2	2
17	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	0	1	1
18	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	2	0	2
19	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	0	2	2
20	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
21	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	4	0	4
22	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	1	3
23	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	0	1	1
24	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	2	0	2
25	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	0	1	1
26	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	1	0	1
27	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	2	0	2

28	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	0	1	1
29	AHLI PERTAMA- GURU PENJASORKES	59	7	66
30	AHLI PERTAMA-GURU PPKN	3	1	4
31	AJUDAN	0	1	1
32	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
33	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	0	1	1
34	ANALIS BENCANA	1	1	2
35	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
36	ANALIS DIKLAT	0	1	1
37	ANALIS HUMAS	0	2	2
38	ANALIS IDEOLOGI	1	0	1
39	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	0	1
40	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	0	1
41	ANALIS JABATAN	0	1	1
42	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	0	1
43	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	0	1	1
44	ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	0	1
45	ANALIS KEMASYARAKATAN	0	1	1
46	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	0	4
47	ANALIS KESEHATAN	2	1	3
48	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	0	1
49	ANALIS KEUANGAN	0	2	2
50	ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	0	1
51	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	0	1
52	ANALIS LAYANAN UMUM	5	8	13
53	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1
54	ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
55	ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
56	ANALIS PARIWISATA	0	1	1
57	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
58	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	1	0	1
59	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
60	ANALIS PENDIDIKAN	2	0	2
61	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	0	2
62	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	0	1	1
63	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1
64	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	0	2
65	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	1	0	1
66	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	0	1
67	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
68	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	0	1
69	ANALIS PERBENDAHARAAN	1	0	1
70	ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
71	ANALIS PERPUSTAKAAN	1	0	1
72	ANALIS PERTANAHAN	0	1	1
73	ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
74	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	0	1	1
75	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	0	2

76	ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
77	ANALIS PROTOKOL	1	2	3
78	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	0	1	1
79	ANALIS TAMAN	1	0	1
80	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	0	1	1
81	BENDAHARA	6	5	11
82	BIDAN TERAMPIL	0	6	6
83	BINATU RUMAH SAKIT	2	0	2
84	GURU	4	4	8
85	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	1	1	2
86	GURU IPA AHLI PERTAMA	1	4	5
87	GURU KELAS AHLI PERTAMA	60	164	224
88	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	2	4	6
89	GURU PAI AHLI PERTAMA	3	6	9
90	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	23	22	45
91	GURU PENJAS AHLI PERTAMA	6	1	7
92	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	2	0	2
93	GURU PPKN AHLI PERTAMA	1	1	2
94	GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA	0	1	1
95	JURU PUNGUT RETRIBUSI	41	2	43
96	OPERATOR ALAT BERAT	1	0	1
97	OPERATOR MESIN	1	0	1
98	OPERATOR RADIO	1	1	2
99	OPERATOR TERMINAL	15	0	15
100	PEMELIHARA JALAN	12	0	12
101	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	0	1
102	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	11	0	11
103	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	1	0	1
104	PENELAHAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	0	1
105	PENELAHAH PERKEMBANGAN BUMD	1	0	1
106	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0	1
107	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	1
108	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
109	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	1	3
110	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	1	2
111	PENGADMINISTRASI UMUM	272	81	353
112	PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	5	13
113	PENGADMINISTRASI UMUM_	3	1	4
114	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	0	1
115	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	0	1
116	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	0	1
117	PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	2	0	2
118	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	1	3
119	PENGELOLA BARANG	1	0	1
120	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4	4	8
121	PENGELOLA BENGKEL	2	0	2
122	PENGELOLA DATA	9	7	16
123	PENGELOLA DATA BASE	2	0	2
124	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	0	2
125	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	0	3

126	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
127	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	0	1
128	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	3	4	7
129	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	0	1	1
130	PENGELOLA GAJI	0	1	1
131	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
132	PENGELOLA KEPERAWATAN	1	0	1
133	PENGELOLA KEUANGAN	52	49	101
134	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	0	1	1
135	PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
136	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	0	3	3
137	PENGELOLA PASAR	1	0	1
138	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	0	1
139	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
140	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
141	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	0	2
142	PENGELOLA PENDAPATAN	3	0	3
143	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	0	1
144	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
145	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	1	1
146	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
147	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	2	3
148	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	0	1	1
149	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	0	1
150	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1
151	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
152	PENGEMUDI	11	0	11
153	PENGEMUDI AMBULANCE	4	0	4
154	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	0	1
155	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	0	1
156	PENJAGA PINTU AIR	6	0	6
157	PENYULUH KEPEMUDAAN	1	0	1
158	PENYULUH KOPERASI	0	1	1
159	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
160	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	0	3	3
161	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	2	0	2
162	PENYULUH WISATA	1	0	1
163	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	0	1	1
164	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	5	12
165	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1	0	1
166	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1	0	1
167	PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	0	1

168	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	0	1
169	PETUGAS KEAMANAN	4	0	4
170	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	12	0	12
171	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	0	1	1
172	PRAMU BAKTI	100	6	106
173	PRAMU KANTOR	1	0	1
174	PRAMU KEBERSIHAN	42	2	44
175	PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	0	1	1
176	PRANATA KEARSIPAN	0	1	1
177	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	1
178	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
179	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
180	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	0	1
181	PRANATA TATA PRAJA	1	1	2
182	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	6
183	TENAGA GURU	0	4	4
184	TERAMPIL - BIDAN	0	6	6
185	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	2
186	TERAMPIL - PERAWAT	5	8	13
187	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	1	0	1
188	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	0	2	2
189	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
	JUMLAH	1111	1091	2202

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum terbanyak dari jabatan Guru Kelas (933 ASN) dari 2.202 ASN fungsional umum.

TABEL 2.11 ASN BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	1	5	1	7	1	2	9	1	1	0	0	0	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	7	1	0	1	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	1	0	2	2	3	13	18	9	9	9	1	1	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7	8	2	0	1	0	0	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	0	0	1	7	3	10	4	14	3	2	6	8	1	1	0	0	60
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	0	0	0	0	0	0	18	3	7	6	0	4	1	1	0	0	0	40
7	DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	0	6	70	23	217	123	152	157	15	29	20	0	0	813
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	0	6	2	0	1	0	0	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	2	1	2	7	4	1	9	2	1	0	0	0	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	15	3	3	5	8	1	4	1	7	4	0	1	0	0	52
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	0	0	1	20	0	10	2	37	17	7	20	6	7	1	0	0	128
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	2	0	0	3	5	6	1	2	7	3	1	1	0	0	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	15	7	10	30	14	20	14	5	8	5	0	1	0	0	129
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3	6	2	1	1	0	0	22
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	1	0	0	1	2	3	4	2	5	6	0	1	0	0	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	5	2	4	0	1	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	4	3	11	25	72	80	1620	420	385	467	559	245	10	0	0	3901
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	3	0	1	9	7	12	5	0	4	2	0	1	0	0	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	0	1	9	2	9	6	13	11	4	5	6	2	0	0	0	0	68
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	1	2	0	9	7	4	6	1	1	1	0	0	32

21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	1	5	5	6	2	1	9	2	1	1	0	0	33
22	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	3	3	4	1	2	4	2	1	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	1	0	7	2	6	12	7	3	3	0	0	42
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	3	1	1	0	0	0	0	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	11
26	KECAMATAN BATANG	0	0	0	0	0	4	3	7	9	27	8	9	3	0	0	0	0	70
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	1	2	0	0	0	0	12
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	9
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	1	0	0	0	0	10
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	1	0	0	0	9
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	10
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	1	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	0	0	0	2	5	2	3	2	2	1	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	11
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	3	1	1	0	0	0	12
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	0	1	1	0	0	0	11
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	3	0	1	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	1	0	2	3	3	4	4	3	3	1	1	0	0	26
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	0	1	1	0	4	28	9	22	60	43	95	38	25	5	0	0	331
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	0	0	0	0	39	1	14	18	14	12	4	1	0	0	0	103
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	2	12	1	9	11	3	4	5	3	4	1	0	0	0	55
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	1	0	2	7	7	27	18	7	11	6	7	6	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	1	0	1	1	4	4	3	5	3	3	1	1	0	0	27
	Jumlah	0	0	6	59	66	81	361	249	2125	811	709	940	717	337	61	0	0	6522

